

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin, H. dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, H. Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adam, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2014, *Rencana Strategis Direktorat Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap 2010-2014*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Nomatif & Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*, St. Paul Minn, West Group.
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014, *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014*, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- _____, 2014, *Komoditas Perikanan Tangkap Direktorat Perikanan Tangkap*, Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Kelompok Kerja Penyelarasan Data Kelautan dan Perikanan, 2014, *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2014*, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

- _____, 2013, *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Untuk Mendukung Industrialisasi KP*, Pusat Data, Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Nasution, S., 1982, *Metode Research*, Jemmars, Bandung.
- Natabaya dkk, 1995, *Penelitian Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, BPHN Dep. Kehakiman, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi dkk, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peaturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 783).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1521).

C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Internet

Diamantina, Amalia, 2001, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan KKP-RI, “Profil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”, http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/53/DIREKTORAT-JENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN/?category_id=31, diakses tanggal 28 juni 2016.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan KKP-RI, “Tambah Tiga Pengadilan Perikanan Untuk indonesia Timur”, http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/136/TAMBAH-TIGA-PENGADILAN-PERIKANAN-UNTUK-INDONESIA-TIMUR/?category_id=21, diakses tanggal 28 Maret 2016.

Direktorat Jenderal PSDKP Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP-RI, “Profil Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Bitung”, http://djpsdkp.kkp.go.id/ppsd/arsip/c/34/PROFIL-PANGKALAN-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-BITUNG/?category_id=2, diakses tanggal 28 Juni 2016.

Dispenal Mabesal, “TNI Angkatan Laut Gelar Pembekalan Pembinaan Potensi Maritim”, <http://www.tnial.mil.id/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/30617/Default.aspx>, diakses tanggal 14 November 2016.

Djumena, Erlangga, “Cegah Pencurian Ikan, Susi Tambah 4 Kapal Pengawas”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/20/070000926/Cegah.Pencurian.Ikan.Susi.Tambah.4.Kapal.Pengawas>, diakses tanggal 28 Juni 2016.

Eleuwarin, Akbar Fitriani, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fisheries And Agriculture Department, “International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing”, <http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm>, diakses tanggal 17 April 2016.

Flothmann, Stefan, Kristin von Kistowski, Emily Dolan, Elsa Lee, Frank Meere and Gunnar Album, “Closing Loopholes: Getting Illegal Fishing Under Control”, *Science Journal, New Series*, Vol. 328, No. 5983, pp. 1235-1236, 2010, diambil dari <http://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/pdf/40656458.pdf> diakses tanggal 20 Oktober 2016.

Forum Tindak Pidana Nasional, “Forum Koordinasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan”, <http://data-tppnasional.kkp.go.id/read/forum->

koordinasi-penanganan-perkara-tindak-pidana-perikanan, diakses tanggal 20 Juni 2016.

Iqbal, Fikri, 2012, *Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Indonesia Investments Tim, “Pertumbuhan Sektor Perikanan Indonesia Melampaui Pertumbuhan Ekonomi”, <http://www.indonesia-investments.com/id/berita/berita-hari-ini/pertumbuhan-sektor-perikanan-indonesia-melampaui-pertumbuhan-ekonomi/item6324>, diakses tanggal 20 Maret 2016.

INTERPOL, “Committee And Working Groups”, <http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Committee-and-Working-Groups/Fisheries-Crime-Working-Group>, diakses tanggal 25 September 2016.

Leroy, Antonia, Florence Galletti, Christian Chaboud, “The EU restrictive trade measures against IUU Fishing”, *Marine Policy Journal*, Vol. 64, p. 82-90, 2016, diambil dari <http://www.sciencedirect.com.ezproxy.ugm.ac.id/science/article/pii/S0308597X15002973> diakses tanggal 26 Juli 2016.

Polsenberg, Johanna, “US and EU team up to combat illegal fishing”, *Frontiers in Ecology and the Environment Journal*, Vol. 9, No. 8, pp. 428-428, 2011, diambil dari <http://www.jstor.org.ezproxy.ugm.ac.id/stable/pdf/23034484.pdf> diakses tanggal 26 Juli 2016.

Renhoran, Maimuna, 2012, *Strategi Penanganan Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Di Laut Arafura*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soebijoto, Hertanto, “KSAL: TNI AL Tak Cuma Urusi Pencurian Ikan”, <http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/24/ksal-tni-al-tak-cuma-urusi-pencurian-ikan>, diakses tanggal 25 September 2016.

Sunyowati, Dina, *Dampak Kegiatan IUU-Fishing Di Indonesia*, Materi Seminar Nasional “Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing Di Wilayah Perbatasan Indonesia” di Universitas Airlangga Surabaya tanggal 22 September 2014.

Yusuf, Nurul Putriyana, 2015, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.